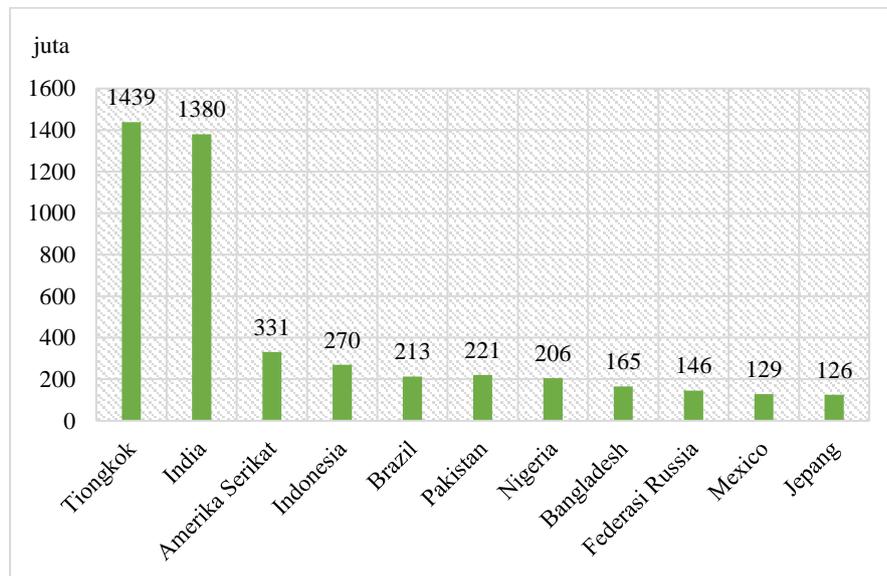


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Subjek Penelitian

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar, secara geografis terletak pada posisi strategis, yakni di persilangan antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Terbentang dari Sabang hingga Merauke dengan 34 provinsi, Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km². Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta km² adalah lautan dan 2,55 juta km² adalah Zona Ekonomi Eksklusif, hanya sekitar 2,01 juta km² yang berupa daratan. Karena letak geografisnya yang strategis dan besarnya luas perairan, Indonesia memiliki batas-batas wilayah yaitu utara–Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Thailand, Palau, dan Laut Cina Selatan; selatan–Australia, Timor Leste, dan Samudera Hindia; barat–Samudera Hindia; timur–Papua Nugini dan Samudera Pasifik. Batas-batas tersebut ada pada 111 pulau terluar yang perlu dijaga dan dikelola dengan baik.



Gambar 4.1 Negara dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Dunia (Juta Jiwa), 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Menurut Sensus Penduduk 2020 jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 270,20 juta jiwa, dengan jumlah penduduk tersebut Indonesia menempati posisi jumlah penduduk tertinggi keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat (Gambar 4.1). Persentase jumlah penduduk Tiongkok, India, dan Amerika Serikat terhadap total penduduk dunia masing-masing mencapai 18,46 persen, 17,70 persen, dan 4,25 persen, sedangkan Indonesia mencapai 3,47 persen.

Sejak Indonesia menyelenggarakan Sensus Penduduk yang pertama pada tahun 1961, jumlah penduduk terus mengalami peningkatan. Hasil SP2020 dibandingkan dengan SP2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 32,56 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 3,26 juta setiap tahun (Gambar 4.2). Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010–2020), laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,25 persen per tahun. Terdapat perlambatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,24 persen poin jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000–2010 yang sebesar 1,49 persen (Gambar 4.2).

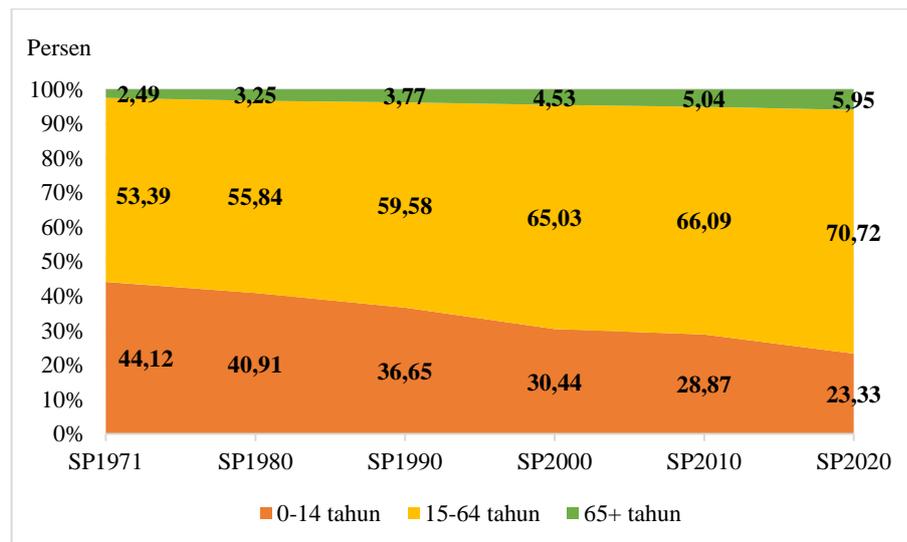


**Gambar 4.2 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Indonesia, 1961-2020**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Penduduk usia produktif memiliki kontribusi besar dalam perekonomian bangsa dengan berperan sebagai pekerja, pelaku usaha, atau pemilik modal. Persentase penduduk usia produktif (15–64 tahun) terus meningkat sejak 1971 (Gambar 4.3). Pada 1971 proporsi penduduk usia produktif adalah sebesar 53,39

persen dari total populasi dan meningkat menjadi 70,72 persen di 2020 atau sekitar 187,2 juta jiwa. Perbedaan antara persentase penduduk usia produktif dan nonproduktif (0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) terlihat lebih tajam di 2020. Persentase penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan penduduk usia nonproduktif tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada era bonus demografi.

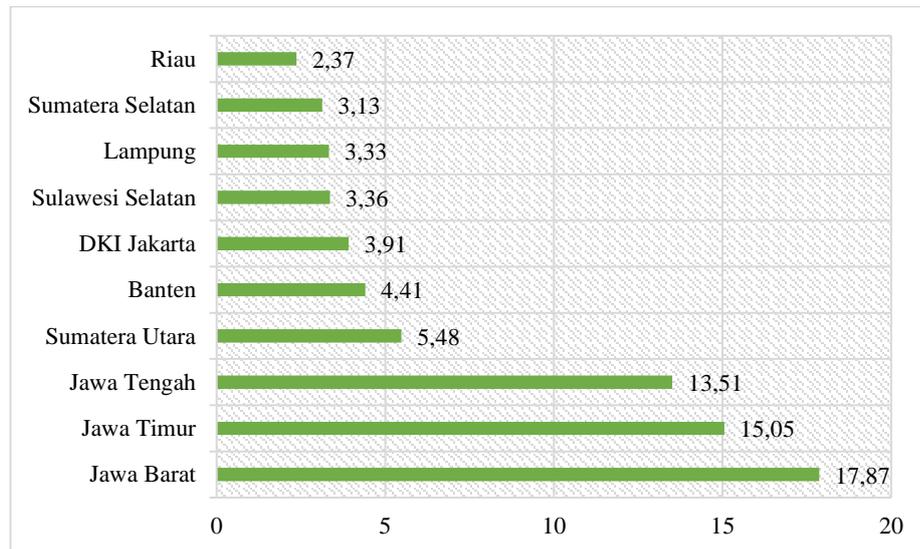


Gambar 4.3 Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur, Tahun 1971–2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Populasi penduduk Indonesia tersebut tersebar di 34 provinsi dengan jumlah sebaran yang bervariasi. Provinsi yang paling padat penduduknya adalah DKI Jakarta. Dengan luas wilayah 664,01 km², DKI Jakarta dihuni oleh lebih dari 10 juta penduduk. Meski demikian, kontribusi penduduk DKI Jakarta hanya 3,91 persen (Gambar 4.4). Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah kontribusi penduduk tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 17,87 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia, urutan provinsi kedua dengan jumlah kontribusi penduduk tertinggi yaitu Jawa Timur sebesar 15,05 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia, dan provinsi ketiga yaitu Jawa Tengah sebesar 13,51 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia (Gambar 4.4). Di luar Jawa, Bali dan Nusa

Tenggara, provinsi yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi adalah Lampung dan Kepulauan Riau.



Gambar 4.4 Sepuluh Provinsi dengan Persentase Jumlah Penduduk Terbesar (Persen), Tahun 2020

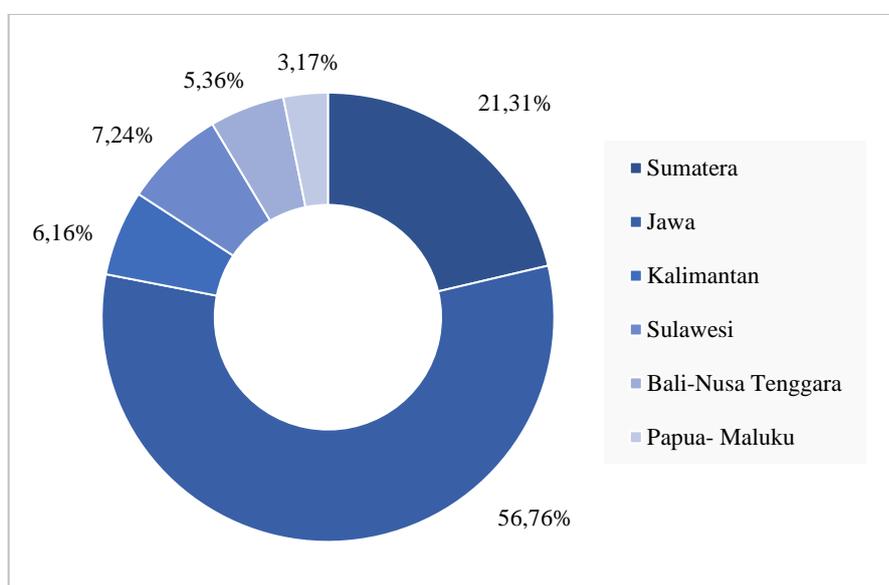
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Salah satu faktor yang memengaruhi sebaran penduduk ini adalah disparitas pembangunan wilayah. Disparitas pembangunan yang semakin besar akan memperlebar ketidakmerataan sebaran penduduk. Daerah dengan kemajuan pembangunan yang pesat memiliki daya tarik yang kuat bagi penduduk daerah lain untuk bermigrasi masuk ke daerah tersebut. Proses ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan mengakibatkan kepadatan penduduk di daerah tersebut terus meningkat.

Disparitas pembangunan Jawa dan Luar Jawa sebetulnya sudah terjadi sejak zaman kolonial. Disparitas pembangunan utamanya disebabkan oleh faktor sejarah, kesuburan tanah dan ketersediaan sumber daya alam (SDA), kesiapan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana. Hingga saat ini, Pulau Jawa masih menjadi pusat aktivitas ekonomi sehingga memiliki daya tarik yang kuat bagi penduduk luar pulau untuk bermigrasi. Pada tahun 2020 kontribusi Pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 59 persen.

Pada tahun 2020 sebagian besar penduduk usia produktif menghuni Pulau Jawa. Jumlah penduduk usia produktif yang menghuni Pulau Jawa mencapai lebih

dari separuh total penduduk usia produktif Indonesia, yaitu sebanyak 56,76 persen (Gambar 4.5). Sebaran ini terlihat kurang merata mengingat luas wilayah Pulau Jawa yang hanya 6,72 persen dari total luas wilayah Indonesia. Sementara pulau lain dengan wilayah yang lebih luas justru dihuni oleh penduduk usia produktif yang lebih sedikit. Menurut Gilbert dan Gugler (1996) migrasi lebih banyak dilakukan oleh penduduk usia produktif, sehingga wilayah tujuan migrasi akan lebih banyak ditinggali oleh penduduk berusia produktif atau usia muda. Kawasan yang persentase penduduk migrannya tinggi cenderung mempunyai persentase usia muda lebih tinggi sekaligus persentase penduduk lansia yang lebih rendah.



Gambar 4.5 Persentase Penduduk Usia Produktif menurut Pulau (Persen), Tahun 2020

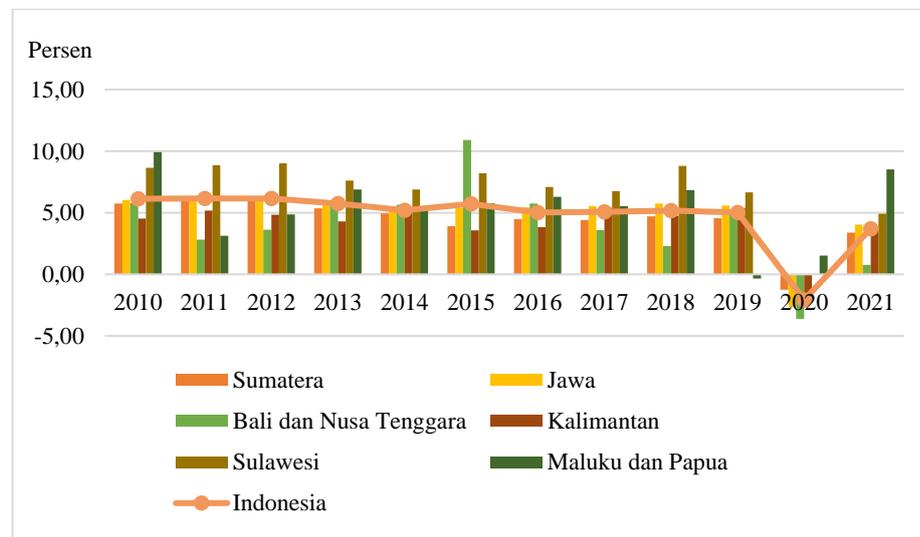
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Penduduk usia produktif sebagai agen pembangunan diharapkan terdistribusi secara merata dan proporsional, sehingga aktivitas ekonomi juga dapat terdistribusi di seluruh wilayah. Dengan demikian, pembangunan menjadi tidak akan terpusat di wilayah tertentu saja, melainkan merata di seluruh wilayah. Dengan adanya sebaran yang merata, maka manfaat pembangunan diharapkan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat Indonesia.

4.2 Deskripsi Objek Penelitian

4.2.1 Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro & Smith (2006) pertumbuhan ekonomi merupakan proses kegiatan dalam perekonomian selama periode waktu jangka panjang yang ditandai dengan adanya peningkatan kapasitas hasil produksi dalam bentuk barang dan jasa yang mengakibatkan kenaikan pendapatan atau output nasional. Menurut BPS, pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB/PDRB atas dasar harga konstan. Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator ekonomi makro untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara selama kurun waktu tertentu, demikian pula dengan PDRB, pada dasarnya PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah domestik untuk selanjutnya digunakan sebagai konsumsi akhir masyarakat. Data PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun, melalui data PDRB pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi dalam menentukan kebijakan-kebijakan ekonomi makro selanjutnya.



**Gambar 4.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
(Persen), Tahun 2010-2021**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Penelitian ini menggunakan PDRB 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2010-2021 sebagai indikator dalam mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam Gambar 4.6 Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan data laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kurun waktu 12 tahun yaitu tahun 2010-2021, menurut data tersebut terjadi fluktuasi angka pertumbuhan ekonomi selama tahun 2010-2021 khususnya untuk dua tahun terakhir yaitu tahun 2020 dan tahun 2021, hal tersebut disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perekonomian nasional mengalami kemerosotan karena menurunnya kinerja sektor-sektor di dalam negeri serta melemahkan permintaan baik dari dalam maupun luar negeri.

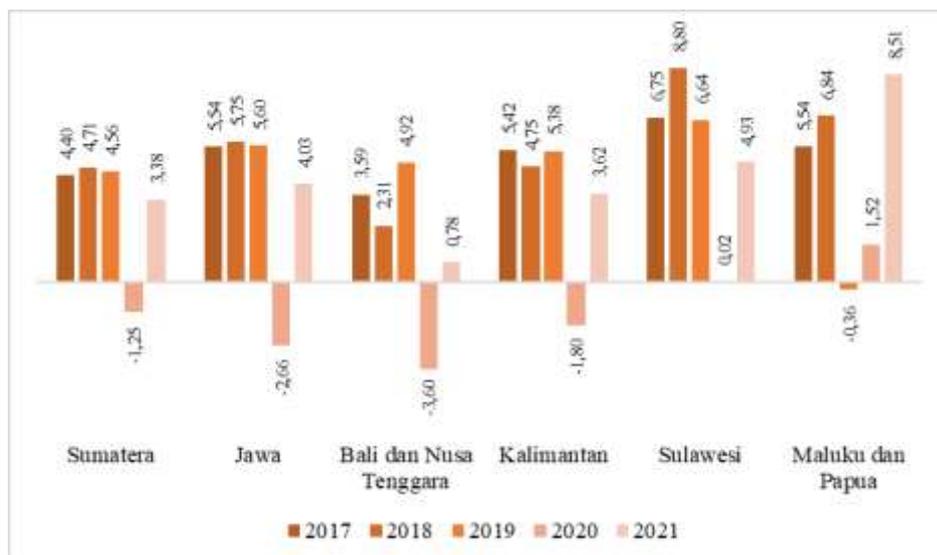
Menurut BPS, puncak kenaikan angka pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 6,5 persen, namun pada tahun-tahun berikutnya laju pertumbuhan PDB mengalami penurunan dan cukup stabil pada angka 5 persen. Tahun 2020 Indonesia mengalami kontraksi ekonomi hingga mencapai -2,07 persen, angka pertumbuhan ini menjadi pertumbuhan negatif pertama sejak krisis ekonomi tahun 1998. Bahkan selama tahun 2020, ekonomi Indonesia dapat dikatakan mengalami resesi ekonomi karena mengalami kontraksi ekonomi selama 3 kuartal berturut-turut sejak kuartal kedua tahun 2020 hingga akhir tahun 2020.

Berdasarkan Gambar 4.6 selama tahun 2010-2021 wilayah Sulawesi memiliki laju pertumbuhan yang mendominasi di antara wilayah lainnya yaitu dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 6,95 persen, lalu wilayah selanjutnya yaitu Maluku dan Papua sebesar 5,35 persen, serta pulau Jawa sebesar 4,91 persen, sementara pulau Sumatera; Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara memiliki rata-rata laju pertumbuhan sebesar 4 persen. Tahun 2020, kontraksi perekonomian nasional dirasakan oleh perekonomian di 4 wilayah yaitu Sumatera, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Kontraksi pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah tersebut masing-masing sebesar -1,19 persen; -2,51 persen; -5,01 persen dan -2,27 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulawesi dan Maluku-Papua mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif walaupun mengalami perlambatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut yaitu

Sulawesi mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 0,23 persen, sedangkan Maluku-Papua mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 1,44 persen.

Pada tahun 2021, momentum pemulihan ekonomi mulai nampak dan menunjukkan hasil, jika dilihat berdasarkan wilayah, pada tahun 2021 terjadi pemulihan ekonomi yang menyeluruh (Gambar 4.6). Meskipun sempat mengalami kontraksi pada tahun 2019 dan 2020, peningkatan kinerja ekonomi pada tahun 2021 tercatat cukup baik di seluruh wilayah. Pertumbuhan tertinggi terjadi di wilayah Maluku dan Papua sebesar 8,51 persen (Gambar 4.7). Menurut BPS, provinsi dengan pertumbuhan paling tinggi terjadi pada Provinsi Maluku Utara. Provinsi Maluku Utara tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 16,40 persen pada tahun 2021 dengan kontribusi sebesar 0,31 persen terhadap total perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara disebabkan karena adanya industri hilirisasi nikel di Halmahera. Industri ini mampu meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

Provinsi Papua menjadi provinsi tertinggi kedua dengan tingkat pertumbuhan mencapai 15,11 persen pada tahun 2021 dan kontribusi perekonomian papua sebesar 1,39 persen terhadap perekonomian nasional. Tingginya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua tidak terlepas dari kinerja sektor pertambangan dan penggalian yang ada di Provinsi Papua.

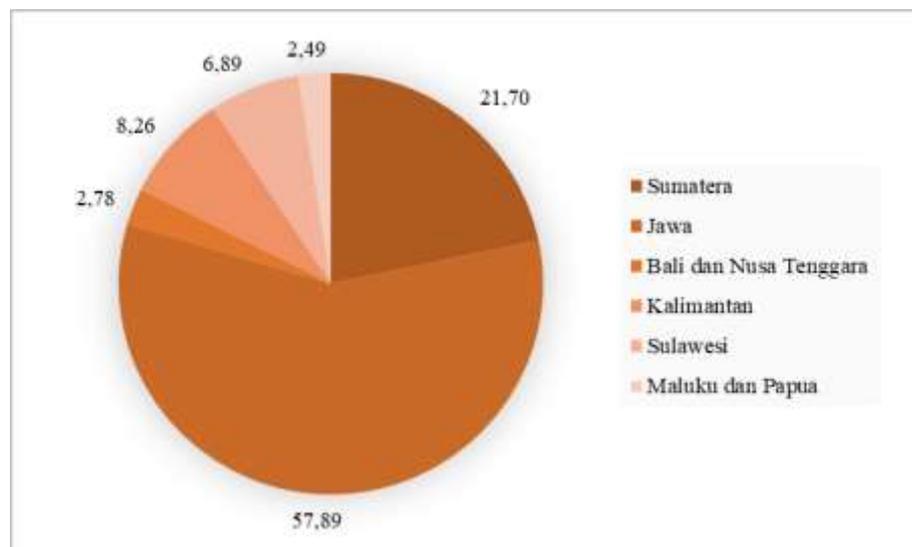


Gambar 4.7 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Wilayah (Persen), Tahun 2017-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Pertumbuhan positif juga dialami oleh empat wilayah lainnya, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Meskipun pertumbuhan pada tahun 2021 masih lebih rendah dibandingkan kondisi sebelum pandemi, namun kinerja ekonomi pada empat wilayah ini dapat dikatakan cukup baik, karena nilai pertumbuhannya hanya sedikit lebih kecil dibandingkan pada kondisi sebelum pandemi. Pertumbuhan ekonomi pada wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi masing-masing sebesar 3,38 persen; 4,03 persen; 3,62 persen dan 4,93 persen (Gambar 4.7).

Sedangkan Bali dan Nusa Tenggara masih terpuakul dan hanya mengalami pertumbuhan sebesar 0,78 persen. Berbeda dengan provinsi lain yang mengalami pertumbuhan, Provinsi Bali justru masih mengalami kontraksi pertumbuhan pada tahun 2021. Provinsi Bali tercatat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -2,47 persen pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena perekonomian Bali masih bergantung pada sektor pariwisata.



Gambar 4.8 Kontribusi Ekonomi Menurut Wilayah (Persen), Tahun 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Berdasarkan kontribusinya, wilayah Jawa masih mendominasi perekonomian nasional. Dari Gambar 4.8 dapat dilihat bahwa sebesar 57,89 persen ekonomi

nasional masih ditopang oleh ekonomi di wilayah Jawa. Kemudian 21,70 persen berasal dari Sumatera, 8,26 persen dari Kalimantan, 6,89 persen dari Sulawesi, 2,78 persen dari Bali dan Nusa Tenggara, serta 2,49 persen dari Maluku dan Papua. Tingginya kontribusi ekonomi di wilayah Jawa bersumber dari industri dan pertanian. Selain itu wilayah Jawa juga termasuk wilayah terpadat penduduknya dibandingkan wilayah lain di luar Jawa. Hal ini menyebabkan perputaran ekonomi di wilayah Jawa menjadi sangat tinggi.

Provinsi DKI Jakarta masih merupakan provinsi dengan kontribusi tertinggi, yaitu sebesar 17,19 persen pada tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar 3,56 persen pada tahun 2021. Kemudian Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan kontribusi kedua tertinggi, yaitu sebesar 14,48 persen dan memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 3,57 persen pada tahun 2021. Setelah itu dilanjutkan oleh Provinsi Jawa Barat dengan kontribusi sebesar 13,03 persen dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,74 persen.

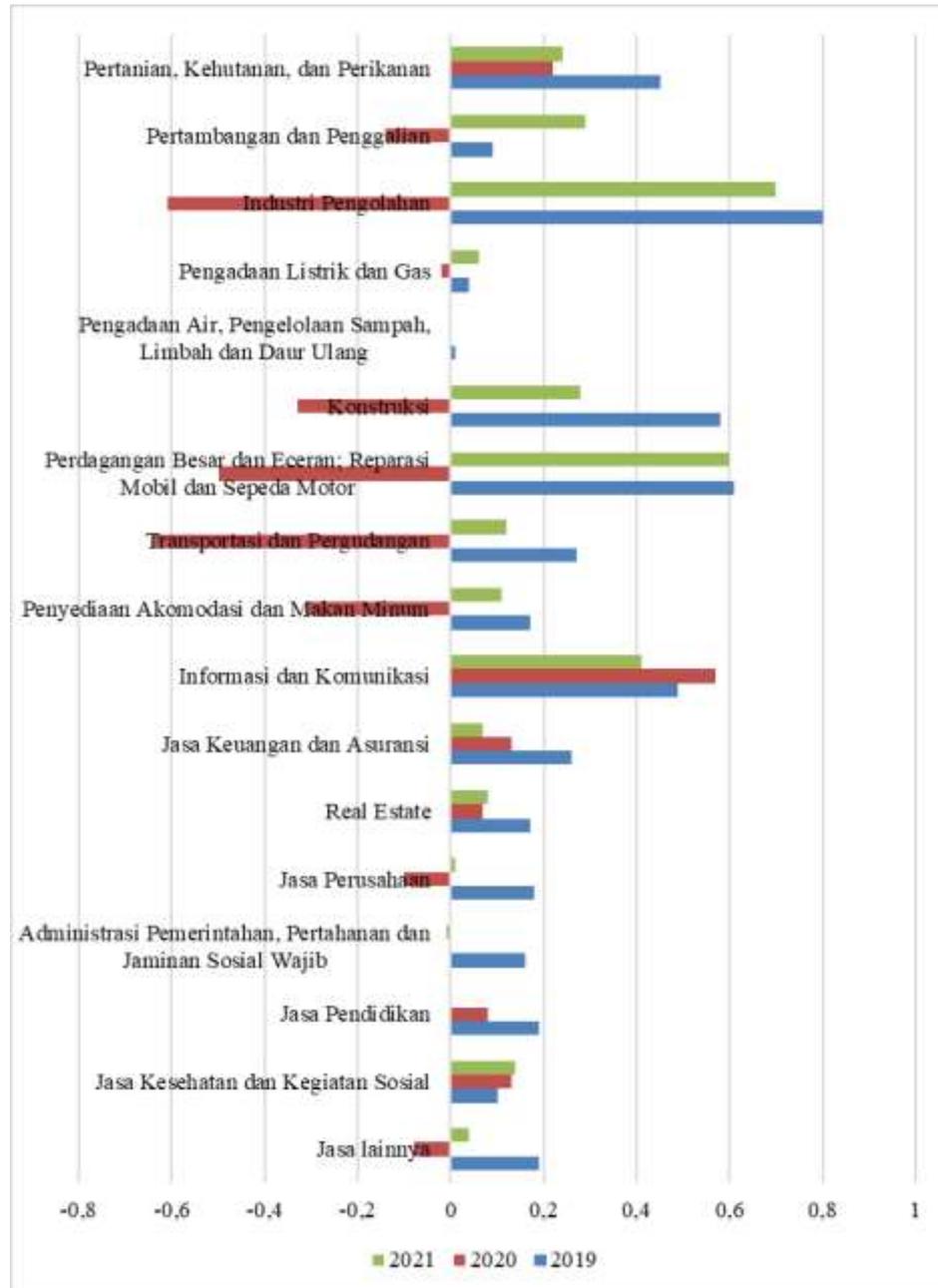
4.2.2 Deskripsi Output Manufaktur

Industri manufaktur adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir (Badan Pusat Statistik, 2021). Sementara output dalam industri manufaktur dapat diproyeksikan melalui nilai tambah sektor manufaktur yang merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (pengurangan output dengan input antara) yang dihasilkan pada sektor industri. Berikut ini adalah informasi mengenai output manufaktur pada 34 provinsi di Indonesia tahun 2010-2020.

Pertumbuhan sektor manufaktur Indonesia telah berhasil dilewati pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 1992, namun pada tahun 1998 mengalami pertumbuhan yang lebih lambat akibat *Asian Financial Crisis* (AFC) dan berjuang untuk kembali ke jalur semula. Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia pernah mengalami transformasi struktural pertama bahwa kontribusi manufaktur terhadap PDB lebih besar daripada kontribusi sektor pertanian terhadap PDB. Indonesia melakukan kebijakan ekonomi yang baik dalam menemukan keseimbangan dan konektivitas antara neraca perdagangan dan *degree of openness* pada tahun 1987–

1991, yang berhasil membantu Indonesia mengalami transformasi struktural, namun dari tahun 1993 hingga 1996, Indonesia mengalami perubahan kebijakan yang mempengaruhi perdagangan internasional dan persaingan perusahaan manufaktur, misalnya proyek mobil nasional tahun 1996 yang tidak sesuai dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 1998. Proyek ini tidak ditentang oleh negara asing tetapi juga oleh perusahaan gabungan dalam negeri.

Selama AFC, Indonesia menerapkan serangkaian reformasi struktural dan mengubah era pemerintahan dari era orde baru ke era reformasi. Sektor manufaktur kembali melakukan beberapa penyesuaian, termasuk industri strategis seperti Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) yang harus melakukan restrukturisasi internal dengan mempertimbangkan reformasi ekonomi.



Gambar 4.9 Sumber Pertumbuhan PDB berdasarkan Sektor Lapangan Usaha Tahun 2019-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Sejak tahun 1998 hingga 2004, Indonesia berjuang untuk menyesuaikan daya saing manufakturnya dari yang digerakkan oleh kebijakan menjadi digerakkan oleh mekanisme pasar selama era reformasi. Saat ini, pembangunan ekonomi Indonesia lebih mengarah pada pengembangan sektor industri manufaktur karena sektor industri manufaktur dianggap sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi

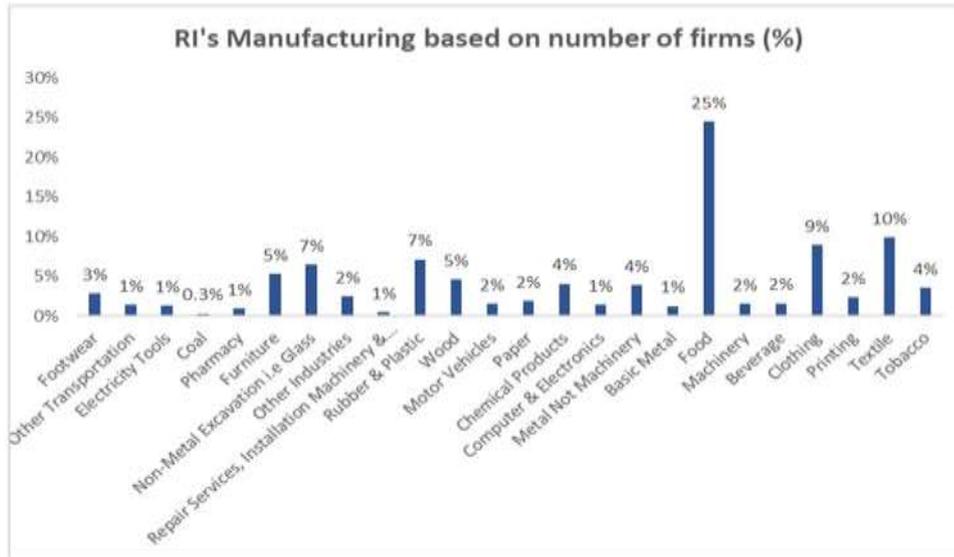
Fitri Mardiyah, 2023

PENGARUH OUTPUT SEKTOR MANUFAKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2010-2021

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dibandingkan dengan sektor lainnya. Kontribusi sektor industri dapat dilihat dari indikator PDB (Gambar 4.9) dimana sektor industri memberikan kontribusi pendapatan nasional yang paling besar setiap tahunnya, dan pertumbuhannya juga meningkat.

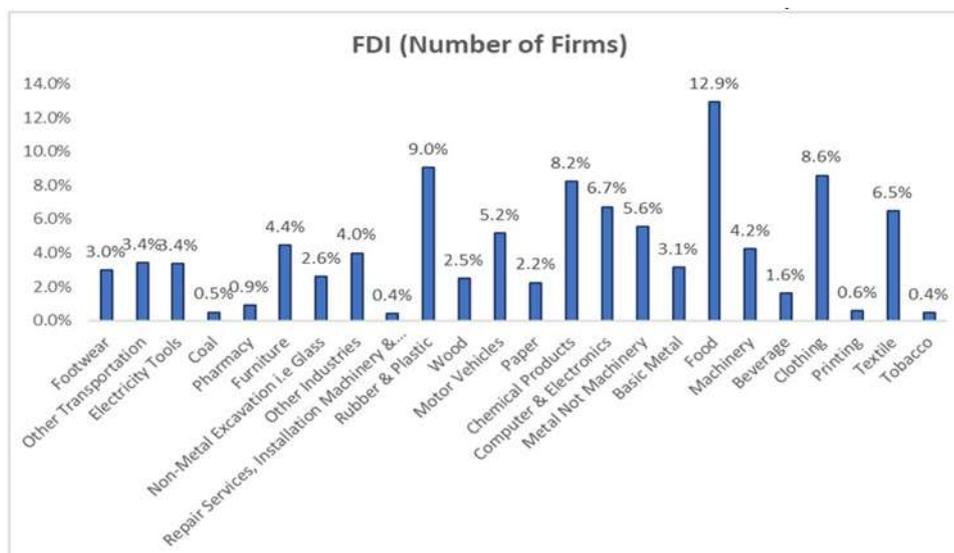
Selain itu, sektor manufaktur menjadi sektor penciptaan lapangan kerja yang dominan. Sektor manufaktur menyerap sekitar 14 persen tenaga kerja yang lebih dari rata-rata penyerapan nasional sebesar enam persen. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor manufaktur tumbuh 1,4 persen per tahun dalam sepuluh tahun terakhir. Laju pertumbuhan ini berada di atas rata-rata laju pertumbuhan penyerapan total sebesar 0,11 persen selama sepuluh tahun sebelumnya (Verico, 2021). Angka ini sekaligus membuktikan bahwa sektor manufaktur tetap sangat penting bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja. Temuan ini menunjukkan bahwa Indonesia harus meningkatkan produktivitas manufakturnya dengan menggabungkan mekanisme pasar dan intervensi kebijakan. Selain itu sektor ini harus selaras dengan mekanisme pasar dan mengadopsi pendekatan yang ramah pasar. Setiap kebijakan tidak boleh menimbulkan diskriminasi antar perusahaan. Namun, mengingat kebijakan mundur pada pertengahan tahun 1990 sebelum terjadi AFC, peningkatan daya saing sektor manufaktur harus dimulai dari sisi *supply* (sisi produksi).



Gambar 4.10 Sektor Manufaktur berdasarkan Jumlah Perusahaan Tahun 2020

Sumber: Verico, 2021

Berdasarkan jumlah perusahaan, sebagian besar perusahaan di Indonesia adalah industri makanan kemudian diikuti oleh tekstil dan pakaian jadi (Gambar 4.10). Jumlah perusahaan asing yang melakukan penanaman modal langsung atau FDI (*Foreign Direct Investment*) di Indonesia juga mengikuti (Gambar 4.11).



Gambar 4.11 Penanaman Modal Asing pada Sektor Manufaktur Tahun 2020

Sumber: Verico, 2021

Jumlah tertinggi dari perusahaan asing yang berinvestasi yaitu pada produk makanan, untuk jumlah tertinggi berikutnya diikuti oleh karet, pakaian, dan bahan kimia seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Selanjutnya, berdasarkan perbandingan nilai investasi antara FDI dan DDI (*Domestic Direct Investment*) pada Gambar 4.12 menunjukkan bahwa FDI terbesar adalah pada komputer dan elektronik, kendaraan bermotor, transportasi lainnya, alas kaki, dan pakaian dari segi nilai. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perusahaan manufaktur Indonesia bergerak di level teknologi ringan, termasuk yang berasal dari luar negeri. Sektor manufaktur Indonesia yang dominan menarik investor domestik dan investor asing dari segi jumlah atau nilai adalah produk terkait makanan, tekstil, pakaian, alas kaki, karet, produk kimia, komputer, dan elektronik.



Gambar 4.12 Proporsi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri pada Sektor Manufaktur Tahun 2020

Sumber: Verico, 2021

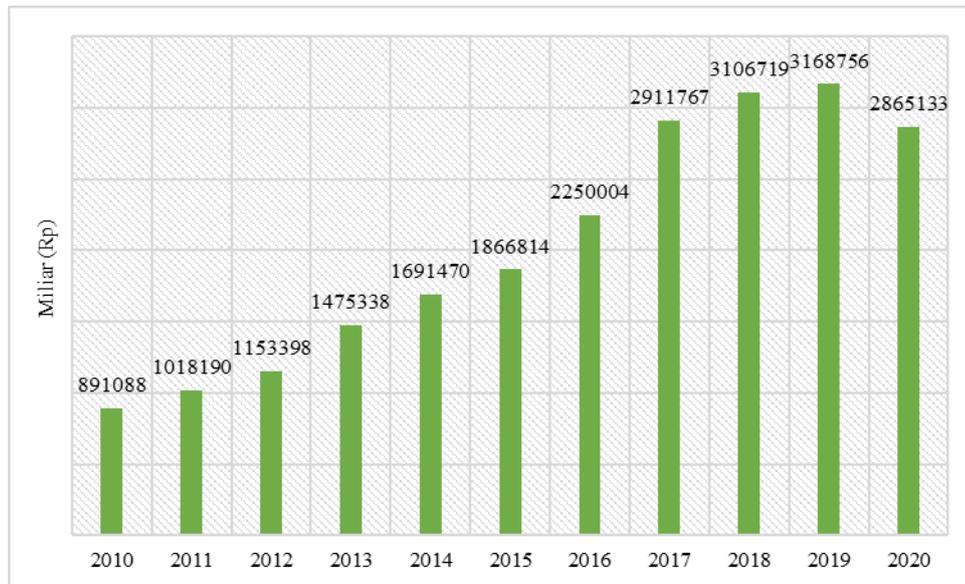
Selama periode tahun 2010 hingga tahun 2020 kondisi output industri manufaktur di Indonesia mengalami persentase peningkatan nilai tambah dengan

Fitri Mardiyah, 2023

PENGARUH OUTPUT SEKTOR MANUFAKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2010-2021

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

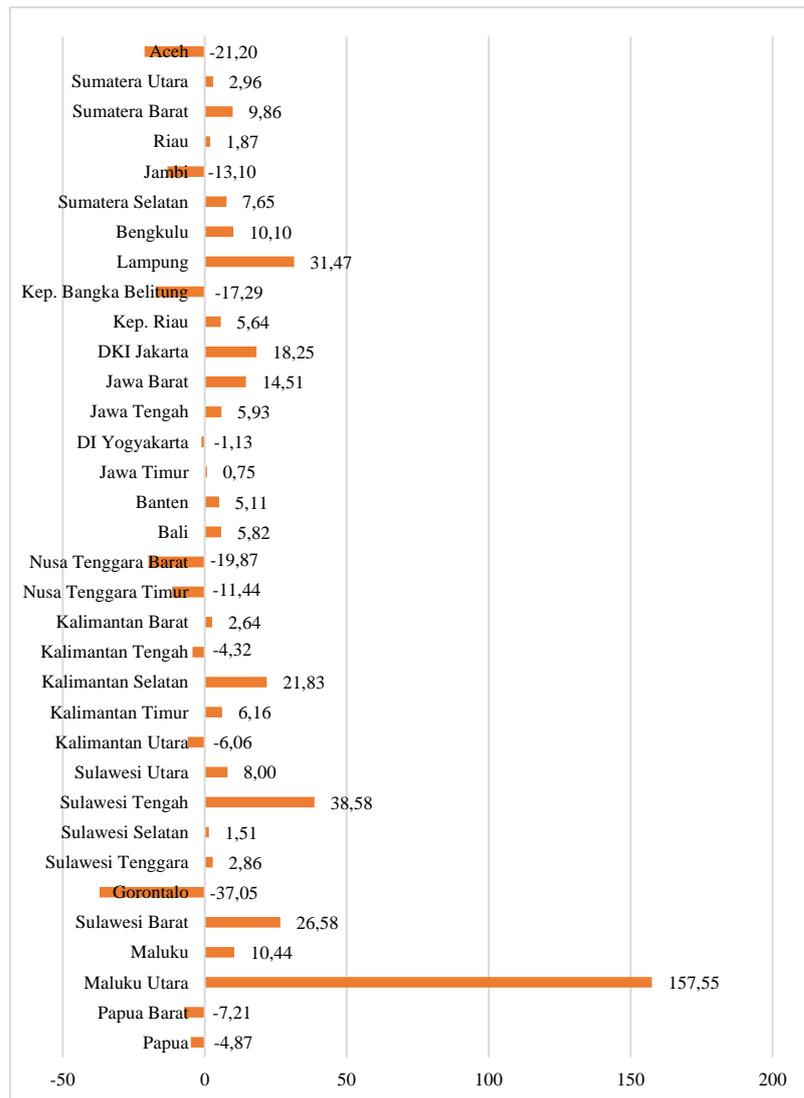
rata-rata 12,80 persen atau setiap tahunnya mengalami peningkatan sebesar 10-20 persen (Gambar 4.13). Industri manufaktur mengalami peningkatan output tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 29,41 persen atau meningkat sekitar 661.763 miliar rupiah, sementara pada tahun 2020 industri manufaktur mengalami kemerosotan nilai output sebesar -9,58 persen, hal tersebut merupakan dampak adanya kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19.



Gambar 4.13 Nilai Tambah Industri Manufaktur Tahun 2010-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Pada tahun 2021 pertumbuhan industri manufaktur perlahan mulai bangkit akan tetapi masih terdapat beberapa wilayah yang masih mengalami kontraksi. Pertumbuhan industri manufaktur di Indonesia pada 2021 didominasi oleh Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah disebabkan oleh pertumbuhan industri logam dasar yang cukup ekspansif. Provinsi Maluku Utara mengalami pertumbuhan sebesar 157,55 persen dan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 38,58 persen. Provinsi lain yang mengalami pertumbuhan positif terbesar pada periode ini antara lain Provinsi Lampung, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi yang menyumbang kontraksi pertumbuhan industri manufaktur antara lain Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Aceh dan Provinsi Gorontalo.



Gambar 4.14 Pertumbuhan Industri Manufaktur Besar dan Sedang Menurut Provinsi (Persen), Tahun 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

4.3 Analisis Statistik Deskriptif

Berikut ini disajikan data dalam bentuk tabel yang didalamnya memuat mean, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah output manufaktur (lnMVA) dan pertumbuhan ekonomi (lnGRDP).

Fitri Mardiyah, 2023

PENGARUH OUTPUT SEKTOR MANUFAKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2010-2021

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Std. Dev	Minimum	Maksimum
lnGRDP	11.78273	1.16667	9.61473	14.42323
lnMVA	22.96694	2.20600	15.39367	27.76602

Sumber: Lampiran B (data diolah)

Merujuk pada Lampiran B, Tabel 4.1 menunjukkan gambaran umum mengenai pertumbuhan ekonomi dan output manufaktur dari sampel penelitian. Berdasarkan jumlah sampel provinsi di Indonesia dari tahun 2010-2021 dapat diketahui provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2019 di DKI Jakarta sebesar 14,42323 persen dan yang terendah yaitu Maluku Utara pada tahun 2010 sebesar 9,61473 persen. Selanjutnya, untuk output manufaktur, nilai tertinggi terjadi pada tahun 2018 di Jawa Barat sebesar 27,76602 persen, sedangkan nilai output manufaktur terendah terjadi pada tahun 2012 di Maluku Utara sebesar 15,39367 persen.

4.4 Pemilihan Model Estimasi Data Panel

4.4.1 Uji Chow (*Common Effect* atau *Fixed Effect*)

Menurut (Rohmana, 2013) apabila F-test maupun Chi-square tidak signifikan ($p\text{-value} > 5\%$) maka H_0 diterima sehingga menggunakan model *common effect*. Sedangkan apabila $p\text{-value} < 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga model yang digunakan adalah *fixed effect*.

Tabel 4.2 Uji Chow

<i>Effect Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	179.842148	(33,299)	0.0000
<i>Cross-section Chi square</i>	1014.456978	33	0.0000

Sumber: Lampiran C1 (data diolah)

Diketahui dari Tabel 4.2 hasil uji chow menunjukkan nilai probabilitas *cross-section chi square* sebesar $0,0000 < 0,05$ (α) sehingga ditarik kesimpulan H_0 ditolak dan H_a diterima, yaitu model yang terbaik adalah *Fixed Effect Model*. Kemudian selanjutnya diperlukan untuk memilih apakah menggunakan pendekatan model estimasi *fixed effect* atau *random effect* melalui uji hausman.

4.4.2 Uji Hausman

Jika statistik hausman $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga model yang digunakan adalah *random effect*. Jika statistik hausman $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga model yang digunakan adalah *fixed effect*.

Tabel 4.3 Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	48.578703	1	0.0000

Sumber: Lampiran C2 (data diolah)

Diketahui pada Tabel 4.3 nilai probabilitas *cross-section random* sebesar $0,0000 < 0,05$ (α) sehingga ditarik kesimpulan H_0 ditolak dan H_a diterima, model regresi yang diterima adalah *Fixed Effect Model*. Berdasarkan pemilihan metode estimasi uji chow dan uji hausman dapat diketahui bahwa kedua uji tersebut menerima model estimasi *Fixed Effect Model* sehingga tidak perlu melakukan uji ketiga atau uji penentu yaitu uji LM. Maka, dapat disimpulkan model terbaik dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*.

4.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan metode Glejser. Ketentuan pengambilan keputusannya jika nilai probabilitas $> \alpha$ maka variabel bersifat homoskedastisitas, sebaliknya jika nilai probabilitas $< \alpha$ maka variabel bersifat heterokedastisitas.

Tabel 4.4 Uji Heteroskedastisitas

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	-0,134813	0,118084	-1,141664	0,2545
MVA	0,010833	0,005139	2,108192	0,0358

Sumber: Lampiran D2 (data diolah)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser dalam Tabel 4.4 diketahui bahwa nilai probabilitas variabel lebih kecil dari α 0,05 yaitu sebesar 0,0358 sehingga dapat diputuskan bahwa variabel bersifat heteroskedastisitas.

4.6 Hasil Regresi

Model *Fixed Effect* adalah model yang terpilih setelah dilakukan pengujian. Hipotesis awal dari penelitian ini adalah output manufaktur (lnMVA) memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (lnGRDP). Berikut ini merupakan hasil estimasi model terbaik tersebut:

Tabel 4.5 Hasil Regresi berdasarkan *Fixed Effect Model*

	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	8,258880	0,19828	41,65259	0,0000
MVA	0,153431	0,00863	17,77881	0,0000
<i>F-statistic</i>				1005,834
<i>Prob(F-statistic)</i>				0,000000
<i>R-squared</i>				0,991333
<i>Adjusted R-squared</i>				0,990347

Sumber: Lampiran E (data diolah)

Adapun model persamaan hasil regresi sebagai berikut:

$$\ln\text{GRDP}_{it} = 8,258880 + 0,153431 \ln\text{MVA}_{it} + e_{it}$$

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 4.5 diketahui bahwa nilai koefisien konstanta sebesar 8,258880 artinya ketika output manufaktur (lnMVA) itu nol atau tidak ada maka pertumbuhan ekonomi (lnGRDP) bernilai sebesar 8,258880 persen. Sedangkan nilai koefisien regresi untuk output manufaktur (lnMVA) sebesar 0,153431 dan nilai probabilitas 0,0000 artinya bahwa ketika output manufaktur (lnMVA) naik sebesar 1 persen, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,153431 persen dengan demikian output manufaktur (lnMVA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (lnGRDP).

Selanjutnya untuk R^2 menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika R^2 semakin mendekati angka 1, maka kemampuan variabel independen untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen semakin besar. Sedangkan jika R^2 semakin menjauhi angka 1, maka kemampuan variabel independen untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen semakin kecil. Pada Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa R^2 memiliki nilai sebesar 0,991333 maka pengaruh yang diberikan oleh variabel output manufaktur sebesar 99 persen sisanya sebesar 1 persen pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh variabel di luar model.

Kemudian hasil uji t digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan dalam uji t ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Jika nilai $t_{hitung} >$ nilai t_{tabel} maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel tersebut signifikan. Jika nilai $t_{hitung} <$ nilai t_{tabel} maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel tersebut tidak signifikan. Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.5 diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 17,77881 $>$ nilai t_{tabel} sebesar 1,965868 dengan tingkat signifikansi $0.0000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa output manufaktur (lnMVA) berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (lnGRDP).

Jika ditinjau berdasarkan nilai intersep masing-masing provinsi di Indonesia merujuk pada Lampiran E, nilai intersep rata-rata gabungan menunjukkan bahwa

nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi 34 provinsi di Indonesia bernilai 8,258880. Terdapat 13 provinsi yang memiliki intersep positif dan 21 provinsi yang memiliki nilai intersep negatif (Tabel 4.6). DKI Jakarta memiliki nilai intersep positif yang paling besar yaitu 1,950628 dengan arti bahwa ketika output manufaktur konstan atau nol di Indonesia maka pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta lebih tinggi sebesar 1,950628 dari rata-rata gabungan provinsi di Indonesia yang bernilai 8,258880. Sedangkan Provinsi Bali menjadi daerah yang memiliki intersep positif terendah di Indonesia dengan nilai sebesar 0,140502.

Kemudian provinsi yang memiliki nilai intersep negatif yaitu Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat. Provinsi Sulawesi Barat memiliki intersep negatif paling rendah sebesar -1,400830 dengan arti bahwa ketika output manufaktur konstan atau nol, maka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat lebih rendah sebesar 1,400830 dari rata-rata gabungan provinsi di Indonesia sebesar 8,258880.

Tabel 4.6 Nilai Intersep 34 Provinsi di Indonesia

No	<i>Fixed Effect (Cross)</i>	<i>Positive Intercept</i>	Ket
1	_DKIJAKARTA--C	1,950628	Max
2	_JAWATIMUR--C	1,800962	
3	_JAWABARAT--C	1,583084	
4	_JAWATENGAH--C	1,375652	
5	_KALIMANTANTIMUR--C	1,080851	
6	_RIAU--C	0,902617	
7	_SUMATERAUTARA--C	0,900119	
8	_SULAWESISELATAN--C	0,573599	
9	_BANTEN--C	0,541500	
10	_SUMATERASELATAN--C	0,460181	
11	_LAMPUNG--C	0,311885	
12	_PAPUA--C	0,244897	
13	_BALI--C	0,140502	Min
No	<i>Fixed Effect (Cross)</i>	<i>Negative Intercept</i>	
1	_NUSATENGGARABARAT--C	-0,002807	Max
2	_SUMATERABARAT--C	-0,008259	

Sumber: Lampiran E (data diolah)

Lanjutan Tabel 4.6

No	Fixed Effect (Cross)	Negative Intercept	Ket
3	_ACEH--C	-0,031451	
4	_KEPULAUANRIAU--C	-0,164867	
5	_JAMBI--C	-0,170474	
6	_KALIMANTANSELATAN--C	-0,187323	
7	_KALIMANTANBARAT--C	-0,209352	
8	_NUSATENGGARATIMUR--C	-0,214591	
9	_SULAWESITENGAH--C	-0,380115	
10	_DIYOGYAKARTA--C	-0,407586	
11	_SULAWESITENGGARA--C	-0,519087	
12	_SULAWESIUTARA--C	-0,556351	
13	_KALIMANTANTENGAH--C	-0,614435	
14	_PAPUABARAT--C	-0,713918	
15	_KALIMANTANUTARA--C	-0,769759	
16	_BENGKULU--C	-1,039374	
17	_BANGKABELITUNG--C	-1,099842	
18	_MALUKU--C	-1,194733	
19	_MALUKUUTARA--C	-1,223380	
20	_GORONTALO--C	-1,364278	
21	_SULAWESIBARAT--C	-1,400830	Min

Sumber: Lampiran E (data diolah)

Nilai intersep untuk masing-masing provinsi memiliki nilai aktual yang diperoleh dari gabungan nilai konstanta dan nilai intersep masing-masing provinsi. Menurut Gujarati & Porter (2010) rumus menghitung nilai intersep aktual, yaitu:

Nilai intersep aktual individu ke-i = α_1 (Konstanta) + α_2 (Intersep Selisih)

Tabel 4.7 Nilai Intersep Aktual

No	Fixed Effect (Cross)	Intersep Selisih (α_2)	Intersep Aktual	Ket
1	_ACEH--C	-0,031451	8,227429	
2	_SUMATERAUTARA--C	0,900119	9,158999	
3	_SUMATERABARAT--C	-0,008259	8,250621	
4	_RIAU--C	0,902617	9,161497	
5	_JAMBI--C	-0,170474	8,088406	
6	_SUMATERASELATAN--C	0,460181	8,719061	
7	_BENGKULU--C	-1,039374	7,219506	
8	_LAMPUNG--C	0,311885	8,570765	
9	_KEPBANGKABELITUNG--C	-1,099842	7,159038	
10	_KEPRIAU--C	-0,164867	8,094013	

Sumber: Lampiran E (data diolah)

Lanjutan Tabel 4.7

No	<i>Fixed Effect (Cross)</i>	Intersep Selisih (α_2)	Intersep Aktual	Ket
11	_DKIJAKARTA--C	1,950628	10,209508	Max
12	_JAWABARAT--C	1,583084	9,841964	
13	_JAWATENGAH--C	1,375652	9,634532	
14	_DIYOGYAKARTA--C	-0,407586	7,851294	
15	_JAWATIMUR--C	1,800962	10,059842	
16	_BANTEN--C	0,541500	8,800380	
17	_BALI--C	0,140502	8,399382	
18	_NUSATENGGARABARAT--C	-0,002807	8,256073	
19	_NUSATENGGARATIMUR--C	-0,214591	8,044289	
20	_KALIMANTANBARAT--C	-0,209352	8,049528	
21	_KALIMANTANTENGAH--C	-0,614435	7,644445	
22	_KALIMANTANSELATAN--C	-0,187323	8,071557	
23	_KALIMANTANTIMUR--C	1,080851	9,339731	
24	_KALIMANTANUTARA--C	-0,769759	7,489121	
25	_SULAWESIUTARA--C	-0,556351	7,702529	
26	_SULAWESITENGAH--C	-0,380115	7,878765	
27	_SULAWESISSELATAN--C	0,573599	8,832479	
28	_SULAWESITENGGARA--C	-0,519087	7,739793	
29	_GORONTALO--C	-1,364278	6,894602	
30	_SULAWESIBARAT--C	-1,400830	6,858050	Min
31	_MALUKU--C	-1,194733	7,064147	
32	_MALUKUUTARA--C	-1,223380	7,035500	
33	_PAPUA--C	0,244897	8,503777	
34	_PAPUABARAT--C	-0,713918	7,544962	

Sumber: Lampiran E (data diolah)

Ketika output manufaktur konstan atau nol maka pertumbuhan ekonomi akan memiliki nilai sesuai dengan intersep dari masing-masing provinsi dengan memiliki rata-rata sebesar 8,258880 persen. Provinsi di Indonesia yang memiliki nilai intersep aktual tertinggi dalam penelitian ini adalah DKI Jakarta dengan nilai 10,209508 persen, hal tersebut berarti bila output manufaktur provinsi yang ada pada model bernilai nol atau konstan, maka DKI Jakarta akan mendapat pengaruh individu terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 10,209508 persen. Merujuk pada Lampiran E dapat disimpulkan bahwa terdapat 13 provinsi yang memiliki nilai intersep aktual di atas nilai rata-rata gabungan yakni Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Sedangkan untuk provinsi yang memiliki intersep aktual yang paling rendah terdapat di Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki nilai intersep di bawah 8 persen dengan nilai aktual yaitu sebesar 6,858050 persen hal tersebut berarti bila output manufaktur provinsi yang ada pada model bernilai nol atau konstan, maka Provinsi Sulawesi Barat akan mendapat pengaruh individu terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 6,858050 persen. Merujuk pada Lampiran E dapat disimpulkan bahwa terdapat 21 provinsi yang memiliki nilai intersep aktual di bawah nilai rata-rata gabungan yakni Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat.

4.7 Pembahasan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengukur pengaruh output manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis awal dalam penelitian ini adalah output manufaktur berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil pengujian regresi diperoleh nilai R^2 sebesar 0,991333 maka pengaruh yang diberikan oleh variabel output manufaktur sebesar 99 persen sisanya sebesar 1 persen pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh variabel di luar model. Selain itu diperoleh juga nilai t_{hitung} sebesar 17,77881 > nilai t_{tabel} sebesar 1,965868 dengan tingkat signifikansi $0,0000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa output manufaktur (lnMVA) berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (lnGRDP). Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian (Ughulu, 2021, Karami Elahinia, & Karami, 2019; Ududechinyere & Nweke, 2018; Ndiaya & Lv, 2018; Okon & Osesie, 2017; Oburota & Ifere, 2017; Adugna, 2014; Pacheco-López & Thirlwall, 2013; Khan & Siddiqi, 2011) yang menyatakan output manufaktur berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disebabkan sektor industri manufaktur memberikan nilai tambah yang lebih besar terhadap pertumbuhan suatu wilayah, menurut Pons-Novell & Viladecans-Marsal (1998) sektor manufaktur memiliki

tingkat pengembalian meningkat (*increasing return to scale*) yang jauh lebih tinggi dari sektor produktif lainnya karena sektor manufaktur bisa menggabungkan teknologi proses lebih mudah, oleh sebab itu, dapat mendorong perekonomian secara keseluruhan. Dalam penelitian lainnya Ududechinyere et al., (2018) menyatakan produktivitas pada sektor manufaktur dapat membawa peningkatan volume dan varietas produk manufaktur yang akan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Melalui studinya Nicholas Kaldor mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi didasari oleh peningkatan keuntungan akibat penambahan jumlah produksi atau output (Adugna, 2014). Selain itu, Kaldor juga memperkenalkan konsep *dynamic economies of scale* yang menyatakan bahwa semakin tinggi pertumbuhan output sektor pengolahan atau manufaktur maka produktivitas sektor ini juga akan semakin tinggi sehingga terjadilah pertumbuhan ekonomi (Prasetio, 2019). Menurut Kaldor, sektor manufaktur memiliki karakteristik dalam menjadi penggerak utama pertumbuhan. Pertama, sektor manufaktur itu sendiri bergantung pada pengembalian yang meningkat (*increasing return*). Pengembalian yang meningkat (*increasing return*) dapat terjadi apabila proporsi peningkatan pada skala output yang dihasilkan melebihi proporsi peningkatan pada skala input yang ditambahkan. Hal tersebut berdampak pada peningkatan produktivitas sektor manufaktur dan pada saat inilah sektor manufaktur beroperasi pada tingkat optimal. Kedua, ketika sektor manufaktur berkembang, pada saat itu dapat menarik tenaga kerja dari sektor lain di mana terjadi kondisi hasil yang semakin berkurang (*diminishing return*), produktivitas dalam sektor ini meningkat secara otomatis karena produk rata-rata tenaga kerja (*average product of labor*) berada di atas produk marjinal (*marginal product*). Dengan demikian, semakin cepat pertumbuhan output sektor manufaktur tumbuh, semakin cepat pula pertumbuhan produktivitas dalam perekonomian secara keseluruhan, di mana hal tersebut merupakan faktor utama sumber pertumbuhan PDB.

Selanjutnya pengklasifikasian provinsi ke dalam kedua kelompok yaitu wilayah provinsi yang memiliki nilai intersep positif dan nilai intersep negatif dapat disimpulkan berdasarkan temuan dalam penelitian ini bahwa pertumbuhan ekonomi pada 21 provinsi dari 34 wilayah provinsi di Indonesia memiliki nilai intersep

negatif, artinya masih terdapat ketimpangan atau ketidakmerataan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, faktor pertama yaitu disparitas pembangunan wilayah. Disparitas pembangunan sebetulnya sudah terjadi sejak zaman kolonial. Disparitas pembangunan utamanya disebabkan oleh faktor sejarah, kesuburan tanah dan ketersediaan sumber daya alam (SDA), kesiapan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana. Disparitas pembangunan yang semakin besar akan memperlebar ketidakmerataan sebaran penduduk. Daerah dengan kemajuan pembangunan yang pesat memiliki daya tarik yang kuat bagi penduduk daerah lain untuk bermigrasi masuk ke daerah tersebut. Proses ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan mengakibatkan kepadatan penduduk di daerah tersebut terus meningkat.

Penduduk usia produktif memiliki kontribusi besar dalam perekonomian bangsa dengan berperan sebagai pekerja, pelaku usaha, atau pemilik modal. Pada tahun 2020 sebagian besar penduduk usia produktif di Indonesia menghuni Pulau Jawa. Jumlah penduduk usia produktif yang menghuni Pulau Jawa mencapai lebih dari separuh total penduduk usia produktif Indonesia, yaitu sebanyak 56,76 persen (Gambar 4.5). Sebaran ini terlihat kurang merata mengingat luas wilayah Pulau Jawa yang hanya 6,72 persen dari total luas wilayah Indonesia. Sementara pulau lain dengan wilayah yang lebih luas justru dihuni oleh penduduk usia produktif yang lebih sedikit. Menurut Gilbert dan Gugler (1996) migrasi lebih banyak dilakukan oleh penduduk usia produktif, sehingga wilayah tujuan migrasi akan lebih banyak ditinggali oleh penduduk berusia produktif atau usia muda. Kawasan yang persentase penduduk migrannya tinggi cenderung mempunyai persentase usia muda lebih tinggi sekaligus persentase penduduk lansia yang lebih rendah.

Hingga saat ini, Pulau Jawa masih menjadi pusat aktivitas ekonomi sehingga memiliki daya tarik yang kuat bagi penduduk luar pulau untuk bermigrasi. Pada tahun 2020 kontribusi Pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 57,89 persen. Selain itu, lokasi industri manufaktur di Indonesia pun terkonsentrasi di wilayah perkotaan pada dua kutub Pulau Jawa, wilayah barat Pulau Jawa terkonsentrasi pada wilayah Jabodetabek dan Bandung sedangkan wilayah timur Pulau Jawa terkonsentrasi di wilayah Surabaya (Kuncoro, 2002;

Sahat, 2014). Proses ini berlangsung secara berulang karena perusahaan baru cenderung memilih lokasi dengan kepadatan kegiatan manufaktur yang juga tinggi.

Faktor kedua dikemukakan oleh Mulyadi (2012) industri manufaktur yang berlokasi di dalam kawasan industri akan memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, di mana kondisi ini terlihat di wilayah yang memiliki kawasan industri pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional. Seperti hasil penelitian ini menemukan bahwa DKI Jakarta memiliki nilai intersep positif yang paling besar yaitu 1,950628 dengan arti bahwa ketika output manufaktur konstan atau nol di Indonesia maka pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta lebih tinggi sebesar 1,950628 dari rata-rata gabungan provinsi di Indonesia yang bernilai 8,258880. Sedangkan Provinsi Sulawesi Barat memiliki intersep negatif tertinggi sebesar -1,400830 dengan arti bahwa ketika output manufaktur konstan atau nol, maka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat lebih rendah sebesar 0,002807 dari rata-rata gabungan provinsi di Indonesia sebesar 8,258880, hal tersebut disebabkan sektor yang mendominasi di wilayah Sulawesi Barat bukan sektor manufaktur melainkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Menurut penelitian Winardi dkk (2017) sektor industri manufaktur yang berlokasi di dalam kawasan industri memberikan nilai efek pengganda terhadap pendapatan tenaga kerja lebih besar dibandingkan dengan industri manufaktur di luar kawasan industri. Sejalan dengan penelitian tersebut Morales dan Fernandes (2003) meneliti nilai dampak kawasan industri terhadap penciptaan nilai tambah oleh perusahaan, hasil penelitian tersebut menemukan bahwa terdapat hubungan yang berbanding lurus antara perusahaan yang berlokasi di dalam kawasan industri dengan penciptaan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri. Selain itu penelitian Cainelli (2008) yang meneliti dampak kawasan industri terhadap pertumbuhan produktivitas perusahaan, hasil penelitiannya menemukan bahwa perusahaan yang berlokasi di kawasan industri memiliki pertumbuhan produktivitas perusahaan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri.

Mulyadi (2012) mengemukakan bahwa kawasan industri dengan infrastruktur yang lengkap dan memadai dapat menjadi suatu keuntungan bagi industri yang

berada di dalamnya karena dapat menghilangkan komponen biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan industri. Berbeda dengan perusahaan industri yang berlokasi di luar kawasan industri dimana biasanya melakukan pembangunan sendiri akses jalan, fasilitas IPAL, energi listrik dan infrastruktur lainnya. Selain itu, jarak yang berdekatan antara industri yang saling berkaitan akan mempermudah proses distribusi barang sehingga menciptakan efisiensi produksi.